PONTIANAK POST

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nop | Des | 2013 | Hal. : 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Pemkot Pontianak Komitmen Tolak Korupsi

Sosialisasi UU Terkait Perbuatan Dalam Tindak Pidana Korupsi

FOTO IST

ANTIKORUPSI: Narasumber tengah memaparkan materi kepada peserta sosialisasi UU terkait perbuatan dalam tindak pidana korupsi.

BAGIAN Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak menggelar membuka sosialisasi undang-undang perbuatan dalam tindak pidana korupsi, Selasa (24/9) di aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Walikota Pontianak. Sosialisasi ini digelar kerja sama antara Pemkot Pontianak dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

Sosialisasi ini diikuti sebanyak 250 orang peserta yang terdiri atas PNS di lingkungan Pemkot Pontianak yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa dan pengelolaan keuangan. Materi yang disosialisasikan terkait Undang-undang (UU) Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, UU Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi dan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi.

Asisten Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Pontianak, Uray Indra Mulya, meminta jajaran aparatur Pemkot Pontianak diminta untuk memiliki jiwa dan semangat yang terus berkomitmen untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk apa pun. Dalam upaya menjadikan Kota Pontianak sebagai kota yang bebas dari korupsi, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak telah melakukan upaya preventif secara internal.

"Baik dengan pernyataan sikap oleh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkot yang dituangkan dalam Pakta Integritas, memangkas izin-izin dan percepatan berbagai izin usaha dan izin yang diberikan secara gratis," ujarnya.

Segala upaya yang dilakukan Pemkot dalam pencegahan praktek korupsi tersebut telah membuahkan hasil hingga mengantarkan Pemkot meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah dalam dua tahun berturut-turut yakni 2011 dan 2012 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Untuk itu saya mengajak jajaran aparatur Pemkot agar terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan predikat WTP yang telah berhasil diraih tersebut di masa-masa yang akan datang," tukasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Pontianak, Sri Sujiarti menyatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman aparatur Pemkot Pontianak mengenali ruang lingkup tindak pidana korupsi dan tindak pidana gratifikasi khususnya terkait pengadaan barang dan jasa. "Ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan clean and good government di lingkungan Pemkot Pontianak," imbuhnya.

Asisten Intelejen Kejati Kalbar, Lumumba Tambunan, mengatakan bahwa dalam peta kejaksaan, Pemkot Pontianak adalah kawasan yang paling bersih di antara daerah lainnya di provinsi ini. Menurutnya yang terpenting dalam korupsi adalah bukan pada penanganannya, tetapi pencegahannya. "Kami apresiasi Pemkot Pontianak karena dinilai bersih dibanding daerah lain," ujarnya. ***(c5/ser)***